

# **MENGAGAS DEWAN ARBITRASI NASIONAL TRANSFER PRICING BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (IT) : IKHTIAR MEMITIGASI DAN MEMINIMALKAN RISIKO ABUSE OF TRANSFER PRICING**

**Isnan Murdiansyah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Siswanto**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## **ABSTRAK**

Paper ini bertujuan menganalisa seberapa besar peranan dewan arbitrase nasional transfer pricing berbasis teknologi informasi (IT) untuk memitigasi dan meminimalkan risiko praktik abuse of transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional demi meningkatkan penerimaan pajak negara. Tingginya kehilangan penerimaan pajak mencapai 1.300 triliun/tahun diakibatkan praktik transfer pricing, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya database informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga data wajib pajak kurang handal dan belum terintegrasi. Hasil kajian paper ini menunjukkan bahwa dewan arbitrase nasional transfer pricing berbasis teknologi informasi (IT) berperan penting menciptakan data wajib pajak yang handal dan terintegrasi demi meminimalkan risiko kerugian negara akibat praktik abuse of transfer pricing.

**Kata Kunci:** *Dewan Arbitrase Nasional Transfer Pricing, Transfer Pricing, Penyalahgunaan Transfer Pricing dan Teknologi Informasi*

## **BACKGROUND**

Sebuah kabar kurang menggembirakan bagi penerimaan nasional muncul dari penerimaan pajak negara semester I – 2019 yang baru sekitar Rp 603,34 triliun atau 38,25 persen dari total target 1.577,56 triliun. Banyak pihak berpendapat rendahnya penerimaan pajak tersebut dikarenakan target penerimaan perpajakan sebesar 1.577,56 triliun di APBN 2019 terlalu tinggi. Tentu saja hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja negara, pembangunan infrastruktur dan lainnya. Banyak faktor penyebab seretnya penerimaan pajak, namun banyak pengamat dan pemerhati perpajakan mensinyalir rendahnya penerimaan tersebut disebabkan praktik abuse of transfer pricing yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional demi meminimalkan pembayaran pajak mereka. Tak salah, jumlah potensi kehilangan penerimaan pajak setiap tahun sangat besar mencapai Rp 1.300 triliun.

Praktik transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di Indonesia ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. Meskipun terlihat legal tetapi cara-cara seperti ini dianggap sebagai cara amoral. Contoh sederhana dari praktik penyalahgunaan transfer pricing adalah sebuah perusahaan – X Corp – berkedudukan di negara X memiliki anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT ABC, yang bergerak di bidang industri mainan. Untuk memproduksi mainan yang dijual di Indonesia. PT ABC mengimpor bahan baku dari X Corp. Harga wajar bahan baku tersebut di pasar misal US\$ 10/pcs. Tapi, dalam transaksi antara X Corp dengan PT ABC, harga bahan baku yang sama dijual dengan harga US\$30/pcs ini tidak akan mungkin terjadi jika transaksi tersebut dilakukan dengan perusahaan yang bukan dalam satu grup atau tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga tidak terjadi

prinsip harga pasar wajar pada transaksi ini (arm's length price principle).

Dari contoh sederhana di atas, terlihat bahwa abuse of transfer pricing hanya dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional yang mempunyai anak-anak perusahaan di berbagai negara (international transfer pricing). Sedangkan domestik transfer pricing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap potensi penerimaan pajak pada negara tersebut karena pengurangan laba/penghasilan di satu perusahaan akan mengakibatkan penambahan laba/penghasilan di perusahaan lainnya sehingga hasilnya akan sama ke penerimaan pajak. Walaupun domestik transfer pricing masih dapat digunakan untuk mengalihkan laba dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang masih berhak menikmati kompensasi kerugian.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa abuse of transfer pricing sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurangnya pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak. Rumor menyebutkan bahwa potensi jumlah penerimaan pajak yang hilang akibat praktik abuse of transfer pricing mencapai Rp 1.300 triliun/tahun. Jumlah yang sangat mencengangkan karena jumlah tersebut mencapai 95 persen dari target penerimaan pajak tahun 2019.

Betapapun, kekuatan IT tidak bisa diremehkan karena beberapa negara yang telah mengaplikasikan kemajuan teknologi ini, ternyata mampu menjadi negara yang kuat dalam bidang apapun. Melalui IT dan telekomunikasi mampu melakukan crossing data dan mengintegrasikan sedemikian banyak sebaran informasi. IT bisa menghafal jutaan memori dan miliaran data dari berbagai sumber sehingga bisa membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini IT adalah alat untuk membuat langkah strategis dengan cepat dan tepat. IT bisa secara cepat melakukan matching 1.366 PERDA dengan undang-undang yang berhubungan serta mencatat transaksi dari berbagai sumber, kemudian langsung memberikan input kepada pemerintah daerah apabila secara substansial sama. Teknologi IT yang semakin berkembang ini nampaknya kurang dimanfaatkan padahal melalui instruksi Presiden No. 06 tanggal 24 April 2001 tentang telematika

(telekomunikasi, media, dan informatika) yang bertujuan menciptakan E-Government di Indonesia. Disampaikan melalui perintah itu bahwa aparat pemerintah harus memanfaatkan teknologi telematika untuk mendukung good governance serta mempercepat proses demokrasi. E-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi telematika ini diharapkan menghasilkan simplikasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yaitu dalam bentuk G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business) dan G2G (Government to Government).

Mengingat betapa besar dan pentingnya manfaat dari pembentukan model dewan arbitrase nasional transfer pricing Direktorat Jenderal Pajak berbasis teknologi informasi. Oleh sebab itu maka artikel ini mencoba menganalisa mekanisme kerja, manfaat dan pengaruh dari model pembentukan dewan arbitrase nasional transfer pricing berbasis teknologi informasi (IT) dalam memitigasi dan meminimalisir risiko abuse of transfer pricing.

## KAJIAN PUSTAKA

Transfer Pricing dalam Peraturan Perpajakan Indonesia

Peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm's length principle) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama

baik langsung maupun tidak langsung, atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian arm's length principle yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Aturan tersebut menyebutkan metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, antara lain: metode perbandingan harga (Comparable Uncontrolled Price), metode harga penjualan kembali (Resale Price Method), metode biaya-plus (Cost Plus Method), Metode Pembagian Laba (Profit Split Method) dan Metode Laba bersih transaksional (Transactional Net Margin Method).

## PEMBAHASAN

### 1. Rekomendasi Pembentukan Dewan Arbitrase Nasional Transfer Pricing Berbasis Teknologi Informasi (IT)

Aturan perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif mengatur tentang praktik-praktik transfer pricing dan bagaimana perlakuan perpajakannya. Walaupun begitu, di lapangan masih banyak terjadi praktik-praktik abuse of transfer pricing yang sangat merugikan bagi penerimaan pajak. Hal ini terutama disebabkan karena masih sangat kurangnya sumber daya manusia di lingkungan DJP yang mengerti tentang transfer pricing, padahal jumlah perusahaan multinasional yang beraktivitas di Indonesia semakin banyak dengan adanya globalisasi, semakin terbukanya perekonomian dunia serta menariknya pasar Indonesia di mata investor dunia.

Prinsip self assessment yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia memungkinkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini

berarti Wajib Pajak lah yang pertama kali menentukan berapa pajak yang mereka setor kepada negara. Jumlah pembayaran pajak tersebut baru dapat berubah apabila DJP melakukan pemeriksaan atau penelitian atas jumlah pajak yang disetor. Tetapi jumlah pemeriksa pajak yang mengerti tentang transfer pricing di DJP masih sangat minim sehingga pengawasan/pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap perusahaan multinasional juga sangat terbatas. Selain itu, kualitas pemeriksaan yang dihasilkan juga cukup memprihatinkan. Akibatnya, apabila Wajib Pajak melakukan banding atas jumlah ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP ke Pengadilan Pajak, sebagian besar mengalami kemenangan karena DJP tidak dapat mempertahankan argumennya atau argumennya kurang kuat dibandingkan argumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau konsultannya. Hal ini menyebabkan jumlah penerimaan negara kembali berkurang.

Hal lain yang menyebabkan DJP lemah dalam masalah transfer pricing adalah kurangnya database informasi yang dimiliki oleh DJP. Walaupun databasenya tersedia tetapi sangat sedikit fiskus yang menguasai atau dapat mengakses database tersebut. Padahal untuk menggunakan metode-metode penerapan harga transfer sebagaimana diungkapkan di atas sangat dibutuhkan database yang lengkap tentang keadaan ekonomi, produk, industri, tingkat laba, perusahaan, royalti, lisensi, harga jasa-jasa, dan sebagainya, termasuk juga database perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktik transfer pricing.

Oleh sebab itu, pendirian sebuah Informasi Technology Transfer Pricing Council (ITTPC) melalui dewan arbitrase nasional transfer pricing berbasis teknologi informasi merupakan sebuah pemikiran brilian yang dapat menjadi solusi alternatif dalam mengurangi risiko kehilangan penerimaan pajak.

ITTPC adalah kumpulan dari perwakilan stakeholder perpajakan yang memiliki jadwal berkala dan bertemu melakukan diskusi bersama, persis sama dengan fungsi MPR di Indonesia. MPR merupakan sebuah forum yang terdiri dari CIO (Menteri Keuangan), Divisi IT (Direktorat Jenderal Pajak) dan perwakilan users pajak. Dalam forum berkala ini tugas

utamanya adalah menilai dan mengaudit kinerja sistem informasi yang tersedia, disamping melakukan perancangannya di masa mendatang. Forum ini juga memiliki hak meminta pertanggungjawaban CIO sehubungan dengan tugasnya membangun sistem yang mereka butuhkan walaupun tidak memiliki hubungan struktural secara formal, namun secara psikologis pertemuan ini berpengaruh efektif kepada CIO dan timnya (DJP).

Sebagai salah satu senjata utama dalam bersiang menghadapi era global dan perdagangan bebas saat ini, Kementerian Keuangan melalui DJP harus benar-benar memperhatikan kinerja teknologi informasi yang dipakainya sekarang ini. Untuk keperluan tersebut, DJP harus membentuk sebuah divisi yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi, yang disebut dengan Departemen Teknologi Informasi. Dalam hal ini seorang Chief Information Officer (CIO) yaitu Menteri Keuangan bertanggung jawab kepada pemimpin negara (Presiden). Memformulasikan Pembentukan Dewan Arbitrasi Nasional Transfer Pricing Berbasis Teknologi Informasi (IT)

Formula Pembentukan Dewan Arbitrasi Nasional Transfer Pricing Berbasis IT ini diilhami oleh sebuah ide kreatif dan cerdas dari sebuah perusahaan konsultan internasional yang merekomendasikan pendirian sebuah Information Technology Transfer Pricing Council (ITTPC) dalam sebuah perusahaan. Kemudian, penulis mencoba menerapkannya dalam lingkungan DJP Kementerian Keuangan dengan beberapa perubahan nama bagian dan tugasnya masing-masing. Kemajuan era teknologi informasi saat ini yang menembus batas-batas tempat dan ruang waktu membuat Pemerintah mau tak mau harus melakukan perubahan dalam teknologi informasi yang dimilikinya saat ini. Beberapa hasil studi dan riset menunjukkan hampir 70 persen penguasaan IT di lingkungan Pemerintahan di Indonesia masih sangat lemah sekali berimbang rendahnya keefektifan dan keefisienan dalam proses operasi dan pelayanannya terhadap publik. Spesialisasi pada pengembangan perangkat lunak, termasuk di dalamnya pembuatan aplikasi, perencanaan sistem basis data, aplikasi analisis, dan sebagainya.

Dalam formula Dewan Arbitrasi Nasional Transfer Pricing berbasis IT ini, Penulis mengajukan rancangan formulanya, sebagai berikut: Seorang CIO (Chief Information Officer) akan dijabat Menteri Keuangan yang langsung bertanggung jawab kepada CEO (Chief Executive Officer) dalam hal ini Presiden. CIO sendiri secara fungsional membawahi tiga divisi: yakni sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi. Divisi sistem informasi berfungsi menganalisis kebutuhan informasi dari sebuah lembaga baik saat ini maupun di kemudian hari (aspek demand dan informasi). Seara prinsip, ada dua jenis aktivitas yang harus dilakukan oleh divisi ini, yaitu:

Government Support, merupakan fungsi untuk selalu memonitor kebutuhan manajemen DJP akan informasi sebagai penunjang dalam menjalankan aktivitas pemerintah dan bisnis sehari-hari, mengevaluasi tingkat efektivitas penggunaan aplikasi-aplikasi tambahan perbaikan terhadap sistem yang dimiliki dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan baru.

Information Sistem Studies, merupakan suatu forum penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab untuk selalu memantau perkembangan teknologi di suatu instansi tempat beroperasinya pemerintah daerah tersebut, terutama bagi kompetitor yang memanfaatkannya. Secara berkala, forum ini akan mempresentasikan kepada manajemen puncak kesempatan-kesempatan bisnis pemerintah yang mungkin dilakukan di kemudian hari melalui perangkat teknologi informasi yang baru.

Bagian kedua adalah Divisi Teknologi Informasi yang merupakan fungsi organisasi yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan informasi dari manajemen (aspek supply) dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Paling tidak setidaknya harus ada tiga ahli di bidang ini:

Spesialisasi pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi berintegrasi pada kerja sistem (LAN., WAN, Intranet, Internet, dan lainnya).

Spesialisasi pada implementasi paket-paket yang sudah jadi, seperti oracle, SAP, BAAN, dan sebagainya.

Bagian ketiga yang bertanggung jawab kepada CIO adalah Divisi Manajemen

Informasi yang memiliki tugas utama untuk mengelola dan menjamin agar informasi yang dibutuhkan users dapat dihasilkan oleh suppliers teknologi informasi.

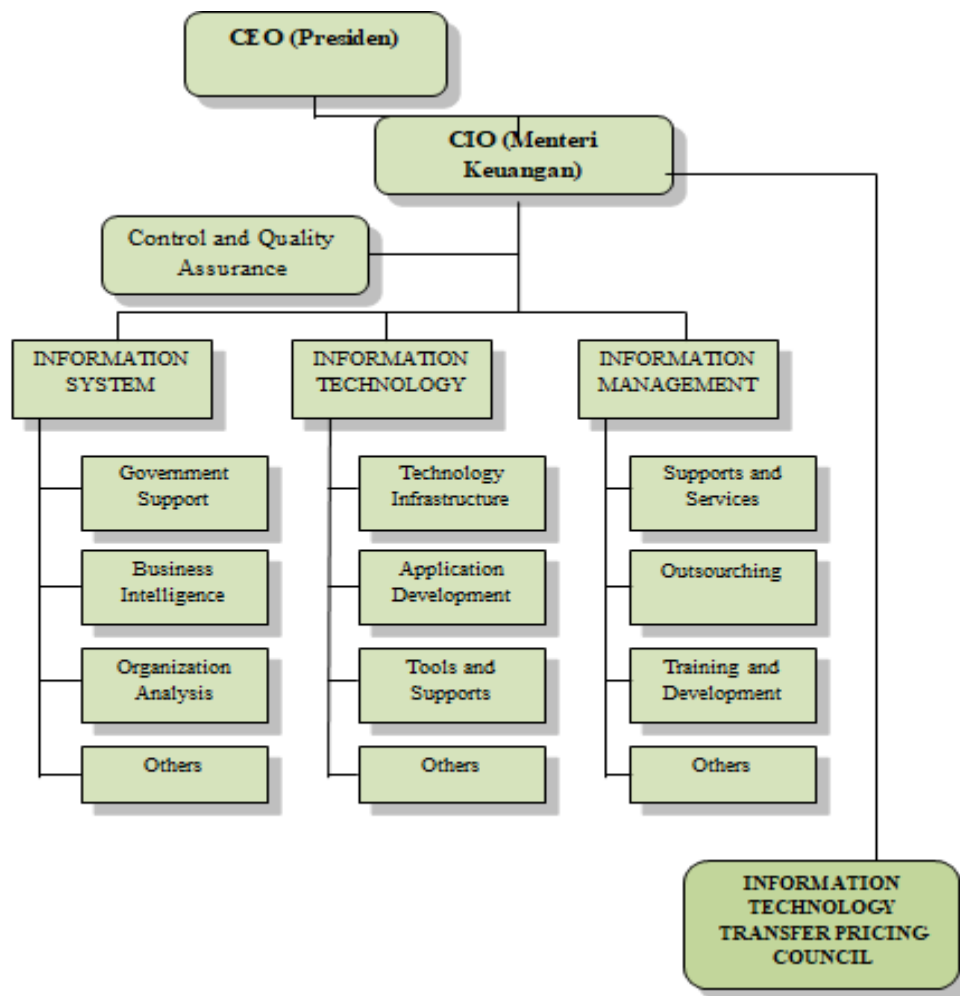
Berdasarkan tugas utama tersebut, paling tidak harus terdapat tiga bagian dalam divisi tersebut:

Pengelola hubungan DJP dengan para penyedia sehubungan dengan teknologi informasi yang diperlukan.

Support and services, yakni mengatasi permasalahan manajemen maupun masalah teknis dalam aktivitas DJP.

Pelatihan dan pengembangan untuk selalu meningkatkan kinerja SDM dengan memperbaiki tingkat kompetensi mereka.

Agar seluruh aktivitas yang dilakukan memiliki kualitas yang baik, CIO akan dibantu oleh tim atau seorang Quality Control Assurance.



Gambar 1

Formula Pembentukan Dewan Arbitrasi Nasional Transfer Pricing di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Sumber: Renaissance Advisors, 1997 (dengan beberapa perubahan)

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Paparan dalam paper ini menunjukkan adanya relasi kuat antara adanya Dewan Arbitrasi Nasional Transfer Pricing Berbasis Teknologi Informasi (IT) dalam

mengembangkan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal (SPI) di lingkungan DJP demi memitigasi dan meminimalkan risiko praktik abuse of transfer pricing. Selain itu, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak

dituntut lebih aktif dan kreatif dalam memaksimalkan setiap kesempatan dan potensi yang dimilikinya. Tak kalah penting, perbaikan dan pembenahan dalam berbagai aspek harus dilakukan. Beberapa saran perbaikan dan pembenahan aspek yang dapat dilakukan, antara lain:

Pertama, Memperkuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang transfer pricing. Untuk itu pelatihan-pelatihan tentang transfer pricing harus semakin banyak dan cakupan pegawai yang diberi pelatihan juga harus lebih banyak khususnya untuk petugas pajak yang bertugas di KPP-KPP tempat terdapatnya perusahaan multinasional. Pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada fungsional pemeriksa pajak tetapi juga kepada Account Representative, Kepala Seksi, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kedua, Menerapkan Advance Pricing Agreement (APA) dengan Wajib Pajak maupun dengan negara lain. Saat ini belum ada Wajib Pajak ataupun negara lain yang bersepakat dengan DJP untuk menerapkan APA walaupun aturan perpajakan yang ada sudah memungkinkan untuk itu (diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 69 Tahun 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer/APA). Oleh karena itu diharapkan DJP lebih mensosialisasikan dan mengajak Wajib Pajak untuk menerapkan APA ini, karena dengan penerapan APA kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketiga, Menerapkan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan negara lain dengan lebih intensif. Saat ini belum ada satu negara pun yang sudah melakukan mutual agreement dengan Indonesia, padahal dengan MAP diharapkan terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua negara dan penerimaan pajak yang diperoleh oleh kedua negara yang melakukan agreement menjadi lebih fair.

## BIBLIOGRAPHY

- 1) Darussalam dan Danny Septriadi. 2008. *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*. Danny Darussalam Tax Center. Jakarta.
- 2) Indrajit, Richardus Eko (2000), *"Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi"*, Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- 3) Kaur, Manpreet, Jaspreet Kaur dan Jasneet Kaur. 2015. "Transfer Pricing Policies and Tax Manipulations". Vol. 13 No. 1. Pp. 383-397.
- 4) Kaur, Manpreet. 2015. "Transfer Pricing Policies and Procedures and its impact on performance evaluation". Vol. 5 No. 2 Issue No. 10 Pp. 265-287.
- 5) Kamath, G. B. 2007. "The Intellectual Capital Performance of Indian Banking Sector". *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 8 No. 1. Pp. 96-123.
- 6) Murdiansyah, Isnan dan Rahmanti, Virginia Nur. 2007. *Pembentukan Dewan Perwakilan Users berbasis Teknologi Informasi (IT) demi mewujudkan Sistem Keuangan Daerah yang handal*. Karya Tulis Ilmiah Tidak dipublikasikan. Universitas Brawijaya
- 7) Murdiansyah, Isnan. 2012. *Memberantas Biaya Siluman*. Kolom opini Harian nasional Suara Karya, 19 April 2012.
- 8) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- 9) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- 10) Prianto Budi S. 2012. *Transfer Pricing Documentation*. Dipresentasikan di Hotel VUE PALACE Bandung tanggal 20 Februari 2012.
- 11)
- 12) Smith, Adam Ovunda. 2015. "The Impact of Transfer Pricing on Financial Reporting: A Nigerian Study." *Journal of Finance and Accounting*. Vol 6, No. 16, 32-45